

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah besar yang dihadapi Negara berkembang adalah disparitas pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan berpotensi memicu munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan masalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pendapatan riil perkapita dalam jangka panjang dan diikuti oleh perbaikan sistem kelembagaan. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan.¹ Keadaan geografis Indonesia yang berupa kepulauan menjadi salah satu hambatan dalam melaksanakan pemerataan pembangunan pada setiap daerah. Kebijakan otonomi daerah merupakan sarana untuk menciptakan pembangunan yang lebih baik, karena kebijakan ini akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dimana pemerintah daerah akan lebih efisien dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia pada masing-masing daerah dan penyediaan barang-barang publik untuk memperlancar kegiatan perekonomian.

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi merupakan masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Banyak orang sering keliru dalam mendefinisikan istilah pertumbuhan ekonomi, keduanya memang menerangkan mengenai perkembangan perekonomian namun memiliki makna berbeda.² Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sedangkan pembangunan memiliki arti

¹ Arsyad, Lincoln, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta, 2010).

² Sadono Sukirno, *Makroekonomi, Teori Pengantar*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2013).

yang lebih luas, mencakup peningkatan pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan, demi menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kenaikan pendapatan perkapita dan produk nasional.

Kesenjangan pembangunan antar wilayah merupakan suatu hal yang umum terjadi dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Kesenjangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografis yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Terjadinya disparitas/ kesenjangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antarwilayah, dan ketidakmerataan distribusi pendapatan akan berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemudian kesejahteraan masyarakat suatu wilayah pun akan mengalami penurunan.³

Disparitas/ Ketimpangan antar wilayah dan pembangunan ekonomi merupakan permasalahan yang dimiliki oleh Provinsi Banten (Pemda Provinsi Banten, 2012). Provinsi Banten merupakan daerah pemekaran berdasarkan UU No. 23 Tahun 2000. UU No. 23 Tahun 2000 merupakan dampak reformasi yang mendorong lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Otonomi Daerah mendorong kebijakan desentralisasi yang merupakan antitesis sentralisasi yang telah menyebabkan ketimpangan pendapatan antar wilayah. Maknanya, desentralisasi bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar wilayah.⁴

Oleh karena itu, dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten No.4 Tahun 2012, salah satu fokus pembangunan yang diprioritaskan oleh Pemerintah

³ Patta, Devianti, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi IPM di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010*, (Skripsi Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012).

⁴ Suhartono, *Ketimpangan dan Pembangunan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Daerah Hasil Pemekaran: Studi kasus di Provinsi Banten dan Gorontalo*, (Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 2015).

Provinsi Banten yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah pemantapan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Pemantapan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Provinsi Banten yakni pertumbuhan dan ketimpangan pendapatan antar wilayah.

Dengan diterapkannya desentralisasi di Provinsi Banten dan RPJMD dengan fokus pemantapan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, diharapkan pertumbuhan ekonomi semakin baik/ meningkat dan kesenjangan pendapatan atau disparitas semakin menurun. Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antar daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten dan semua kabupaten/ kota di Provinsi Banten cenderung menurun selama periode 2010-2016 yaitu sebesar 6,56% pada tahun 2010, menjadi 5,26% pada tahun 2016. Menurut BPS Provinsi Banten 2017, Pertumbuhan Ekonomi yang melambat disebabkan oleh kondisi ekonomi global yang belum pasti dan pemotongan anggaran Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Banten belum sepenuhnya mandiri karena masih sangat dominan ditentukan oleh sisi eksternal. Selama periode 2010-2016 perekonomian Provinsi Banten ditopang oleh 3 sektor, yakni Sektor Industri Pengolahan sebesar 35,74%; Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 14,93%; dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 12,25%. Menurut BPS Provinsi Banten 2017, ketiga sektor ekonomi diatas disebut dengan lapangan usaha/ sektor ekonomi bermasalah. Lapangan usaha yang bermasalah yaitu lapangan usaha yang mengalami perlambatan pertumbuhan dan atau tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan sektoral akan berdampak melambatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten.

Adanya perusahaan atau pabrik-pabrik di Kota Cilegon dan Kota Tangerang yang dimiliki oleh perusahaan asing (PMA), dampaknya barang dan jasa yang dihasilkan di kedua kota tersebut diekspor keluar Kota Cilegon dan Kota Tangerang sehingga uang tidak tersebar secara merata. Selain itu, pembangunan di Cilegon tidak dibarengi peningkatan kualitas sumber daya

manusia di wilayah Cilegon, sehingga perusahaan-perusahaan mempekerjakan para manajer ke atas dari luar Provinsi Banten atau Kota Cilegon⁵. Serta kebijakan pemekaran wilayah di Indonesia tidak didukung oleh penyediaan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM di wilayah pemekaran tersebut.⁶

Daerah yang termasuk kategori relatif tertinggal yakni seluruh Kabupaten di Provinsi Banten yang memiliki ketimpangan pendapatan rendah. Walaupun ketimpangannya rendah, namun struktur ekonomi keempat kabupaten dapat dikategorikan menjadi dua, wilayah yang struktur ekonominya ditopang oleh sektor pertanian (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak) dan wilayah yang ditopang oleh sektor industri pengolahan (Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang).

Daerah-daerah berkembang cepat (Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan) memiliki ketimpangan yang rendah. Hal ini disebabkan karena kedua kota tersebut baru berdiri, yakni Kota Serang pada tahun 2007 dan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2008 sehingga pembangunan ekonomi baru berjalan selama 8 tahunan. Dari struktur ekonominya, kedua kota yang berkembang cepat ini didominasi oleh sektor tersier.

Struktur ekonomi Kota Serang didominasi oleh lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran dan lapangan usaha konstruksi. Masing-masing lapangan usaha tersebut berperan dalam perekonomian. Sedangkan struktur ekonomi Kota Tangerang ditopang oleh lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran dan lapangan usaha keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang memiliki peran yang sangat penting dalam kinerja pembangunan Kota Tangerang Selatan. Perkembangan pesat Kota Tangerang Selatan ini disebabkan oleh berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, terutama Jakarta Selatan merasa mengaku sebagai warga Kota Jakarta Selatan.

⁵ Setyobudi A, *Kesenjangan yang masih membelit*, (Dipetik 02 Maret 2020, dari <http://www.kompas.com>).

⁶ Yuliadi I, *Kesenjangan Investasi dan Evaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah di Indonesia*, (Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2012).

Pada tingkat makro, distribusi peningkatan pendapatan dari pertumbuhan ekonomi juga akan memiliki dampak yang kuat pada pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi juga akan memiliki dampak yang kuat pada pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya diarahkan lebih besar pada pembangunan manusia.⁷ Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan peningkatan pendapatan yang terjadi, maka kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya menjadi lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam bentuk pendapatan masyarakat mulai meningkat. UNDP juga menyatakan sampai akhir tahun 1990an, pembangunan manusia di Indonesia ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan PDB akan mendorong masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.⁸

Tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu Negara menentukan kualitas dan keadaan Negara tersebut, dalam hal ini Indonesia merupakan Negara berkembang yang mempunyai jumlah penduduk yang besar. Dalam realitanya masih banyak masyarakat Indonesia tidak merasakan kesejahteraan dalam hidupnya, dimana salah satu alasannya adalah terkait faktor ekonomi. Selain dilihat dari segi ekonomi, kesejahteraan masyarakat juga bisa dilihat melalui pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan. Pendidikan bisa dilihat dari berapa lama masyarakat Indonesia mengenyam pendidikan. Semakin lama seseorang mengenyam pendidikan maka semakin luas pengetahuannya dan pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Pemerintah Indonesia berencana untuk memberlakukan wajib belajar 12 tahun yang artinya masyarakat Indonesia wajib mengenyam pendidikan minimal

⁷ Ranis, Gustav, *Human Development and Economic Growth*, (Center Discussion Paper of Yale University, No 887, 2004).

⁸ Lilis Setyowati dan Yohana Kus Suparwati, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening*, (Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jawa Tengah, 2012), hlm. 113-133.

sampai pada bangku SMA/ sederajat. Tapi rencana ini belum berjalan sepenuhnya. Hal ini terbukti belum adanya prioritas anggaran dari pemerintah untuk melaksanakan program ini. Terkait dengan hal tersebut perlu diketahui pengaruh Angka Partisipasi Sekolah tingkat SMA/ sederajat terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Suatu pertumbuhan ekonomi adalah penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyatnya. Namun pertumbuhan bukan merupakan akhir dari pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi hanyalah satu alat yang penting. Yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memperbaiki kapabilitas manusianya, dan pada gilirannya bagaimana rakyat menggunakan kapabilitasnya.⁹

Pendapatan merupakan salah satu faktor untuk melihat capaian masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahwa pembangunan yang bertujuan menghasilkan pertumbuhan ekonomi bisa disebut berkualitas jika mampu mengurangi pengangguran, yang pada akhirnya berimplikasi pada pengurangan kemiskinan. Dengan tingkat kemiskinan yang menurun, pemerataan kesejahteraan diharapkan dapat terwujud. Artinya, hasil dari berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan secara bersama ditujukan untuk kepentingan dan kemakmuran bersama. Oleh karena itu, pemerataan kesejahteraan menjadi salah satu acuan dalam menilai kinerja pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti melakukan penelitian sebagai judul skripsi yang berjudul “**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Antar Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Banten**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi yang melambat disebabkan kondisi ekonomi global yang belum pasti dan pemotongan anggaran Pemerintah Pusat.

⁹ Kuncoro, Mudrajad, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2006).

2. Pemerintah Daerah Banten belum sepenuhnya mandiri karena masih sangat dominan ditentukan oleh sisi eksternal, terbukti dengan adanya beberapa perusahaan asing di beberapa kota tertentu di Provinsi Banten.
3. Kurangnya perhatian pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM di wilayah pemekaran tersebut.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini bertujuan agar dalam penelitian terfokuskan pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan penelitian nanti tidak melebar dan menyimpang dari sarasannya. Penulis hanya meneliti Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antar daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Banten Tahun 2015-2019.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten?
2. Apakah disparitas pendapatan antar daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antar daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten?
4. Apakah secara simultan pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antar daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten?
5. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antar daerah terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui pengaruh disparitas pendapatan antar daerah terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antar daerah terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten.
4. Untuk mengetahui simultan pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antar daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antar daerah terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten

F. Manfaat/ Signifikansi Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti merupakan sarana untuk belajar, menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan mengenai pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antar daerah di Provinsi Banten, serta untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan membuat penelitian secara ilmiah dan sistematis.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa/i tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antar daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Banten.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bukti empiris untuk mengkaji dampak dari pertumbuhan ekonomi dan disparitas antar daerah, serta sebagai bahan masukan untuk Pemerintah Provinsi Banten agar memperhatikan sumber-sumber daya yang masing-masing berada di Kabupaten/Kota Banten dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia.

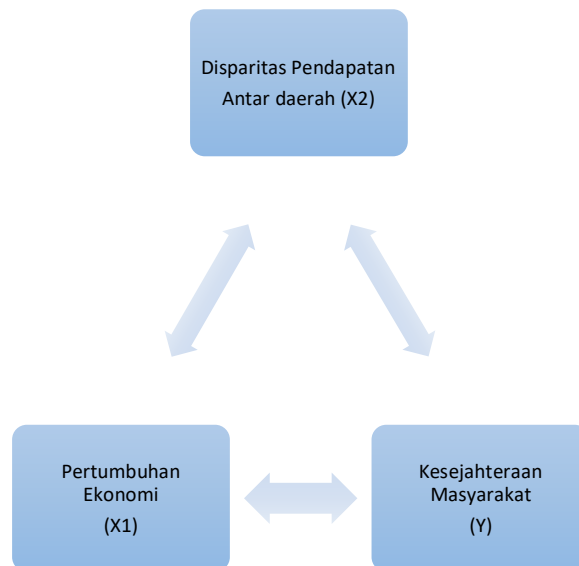
G. Kerangka Pemikiran

Karakteristik alam, ekonomi, sosial, dan budaya yang beraneka ragam pada masing-masing daerah menimbulkan pola pembangunan ekonomi yang berbeda. Hal ini menyebabkan adanya beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lain tumbuh dengan lambat. Perbedaan kemampuan untuk bertumbuh menimbulkan kesenjangan ekonomi seperti ketimpangan pendapatan antar wilayah, sektor, golongan, desa dan kota. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengatur pembangunan wilayahnya.

Tujuan pembangunan ekonomi dapat dicapai melalui suatu perencanaan yang baik dan terkendali. Perencanaan yang dibuat harus sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah. Potensi yang ada diharapkan dapat memberikan sumbangan atau kontribusi yang besar dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan pernyataan di atas, penelitian ini berupaya menjawab beberapa tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh disparitas pendapatan antar daerah terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten dengan menggunakan analisis Indeks Williamson yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori wilayah dengan tingkat ketimpangan rendah dengan nilai Indeks Williamson $< 0,3$, tingkat ketimpangan sedang dengan nilai Indeks Williamson antara $0,3 - 0,7$ dan tingkat

ketimpangan tinggi dengan nilai Indeks Williamson $> 0,7$.¹⁰ Indeks ketimpangan regional ini diformulasikan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Diagram Analisis Jalur Penelitian



H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab pertama yaitu pendahuluan, yang dijadikan acuan dalam proses awal penelitian, di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Pada bab kedua menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai teori.

¹⁰ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Analisis Kesenjangan Antar Wilayah* (Jakarta: 2013).

BAB III: Metodologi Penelitian

Pada bab ketiga menjelaskan tentang metodologi penelitian yang didasarkan dan dikembangkan berdasarkan pokok masalah utama, guna mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan. Pada bab ini menguraikan waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis metodologi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan operasional variabel penelitian yang digunakan.

BAB IV: Analisis Data

Pada bab keempat menjelaskan tentang hasil analisis dan pengolahan data yang telah dilakukan deskriptif sampel penelitian, analisis korelasi antara variabel X dan variabel Y, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V: Penutup

Pada bab ini, berisi kesimpulan dari penelitian berdasarkan analisis data yang telah diolah dan telah dibahas pada bagian sebelumnya dan memberikan saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.